KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

7 NOVEMBER - 13 NOVEMBER 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA

PERKUAT INTEGRITAS, PEGAWAI KANWIL DITJENPAS DIY RUTIN TADARUS AL-QUR'AN



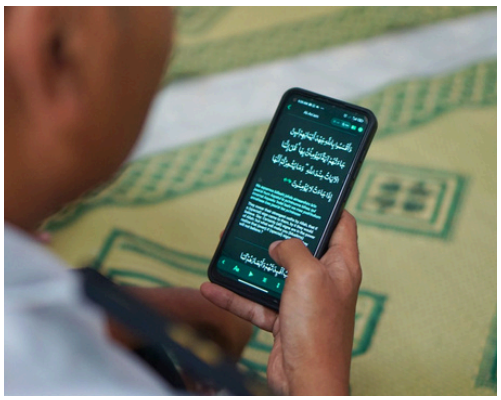



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) kembali menggelar pengajian rutin sebagai bagian dari penguatan mental spiritual dan pembinaan karakter aparatur, Senin (9/11). Berlangsung di Mushala Al-Ishlah, kompleks Kanwil Ditjenpas DIY, kegiatan ini diisi dengan tadarus Al-Qur'an secara bergantian oleh para pegawai, melanjutkan pembacaan Surah Al-An'am hingga ayat 165.

Pengajian tersebut merupakan agenda pembinaan kerohanian yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan nilai-nilai religius di lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, para pegawai memperoleh kesempatan untuk memperdalam bacaan Al-Qur'an sekaligus memperkuat kebersamaan dalam suasana yang khusyuk dan penuh kekeluargaan.

Dalam pelaksanaannya, tadarus dilakukan secara bergiliran dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, sementara peserta lainnya menyimak bacaan.

Metode ini menjadi sarana pembelajaran bersama yang mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta sekaligus membiasakan pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara baik dan benar.

Pembinaan spiritual melalui kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu upaya untuk membangun keseimbangan antara profesionalisme dan penguatan karakter pegawai. Nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan mengaji diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman pribadi, tetapi juga tercermin dalam sikap disiplin, kepedulian terhadap sesama, serta komitmen memberikan pelayanan publik yang humanis dan bertanggung jawab.

Melalui pengajian rutin di Mushala Al-Ishlah, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong pembinaan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kinerja, tetapi juga penguatan keimanan, akhlak, dan integritas. Upaya ini diharapkan mampu membentuk aparatur Pemasyarakatan yang profesional, berkarakter, dan memiliki landasan moral yang kuat.



PERKUAT KINERJA, INTEGRITAS, DAN SPIRITUALITAS, KAKANWIL DITJENPAS DIY BERIKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI

Yogyakarta – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan penguatan dan pembinaan kepada pegawai di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Senin (9/11).

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pembinaan REKSA sekaligus menjadi sarana bagi pimpinan untuk menyampaikan arahan dan memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Penguatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, loyalitas, serta profesionalisme dalam bekerja. Setiap pegawai diharapkan mampu memahami tugas dan fungsinya masing-masing, menjaga etika, serta menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Tidak hanya aspek kedinasan, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya membangun dan menjaga spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pekerjaan bukan semata-mata bentuk tanggung jawab kepada organisasi, tetapi juga merupakan amanah dan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu senantiasa melibatkan Allah SWT dalam setiap langkah, menjaga kejujuran, memperkuat keimanan, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak.

Kakanwil juga mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan spiritual. Dengan hati yang terjaga, niat yang baik, serta ikhtiar yang sungguh-sungguh, diharapkan setiap tugas dapat dilaksanakan secara optimal dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Ditjenpas DIY semakin meningkatkan kapasitas diri, memperkuat integritas dan spiritualitas, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, responsif, dan akuntabel

KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT KOLABORASI RISET HUKUM BERSAMA PUSHAM UII GUNA OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus memperkuat sinergi dengan lembaga akademisi dan pemerhati hukum dalam mengkaji sistem pemidanaan modern. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran instansi dalam kegiatan pertemuan lanjutan riset praktik pemidanaan non-pemenjaraan yang diselenggarakan bersama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) dan The Asia Foundation, Senin (09/11).

Kegiatan strategis yang berfokus pada pembahasan dan review kerangka penelitian ini bertempat di Kantor Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri secara langsung oleh Tim Peneliti Pusham UII, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Madya Kanwil Ditjenpas DIY Lely Mareyke Pajouw, serta perwakilan PK Ahli Muda dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta. Agenda pertama pertemuan ini diisi dengan pembahasan mendalam terkait peninjauan kembali kerangka penelitian, yang mencakup penyempurnaan latar belakang, penajaman rumusan masalah, penetapan tujuan, metodologi, hingga rincian butir-butir pertanyaan penelitian. Evaluasi komprehensif ini dilakukan guna memastikan hasil riset nantinya memiliki validitas akademis yang kuat serta relevan dengan dinamika penegakan hukum di lapangan.

Sebagai kelanjutan dari tahapan review tersebut, tim riset sepakat untuk segera melaksanakan perbaikan kerangka penelitian serta mempersiapkan proses pengambilan data langsung kepada para responden terkait. Kajian mendalam mengenai praktik pidana non-pemenjaraan ini dinilai sangat krusial dalam mendukung pengembangan model keadilan restoratif dan pemasyarakatan yang lebih humanis.

Menanggapi pelaksanaan riset ini, Kanwil Ditjenpas DIY menyatakan komitmen penuh untuk memberikan dukungan konkrit, termasuk dalam hal penyediaan data sekunder maupun berbagai hal penunjang yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi kemajuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

KANWIL DITJENPAS DIY SINERGI BERSAMA KESBANGPOL DAN BNNP DIY PETAKAN MODUS BARU PEREDARAN NARKOTIKA





YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika lintas sektoral. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran instansi dalam kegiatan Rapat Kerja Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Provinsi DIY yang bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DIY, Senin (09/11).

Rapat kerja strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi DIY, yang dalam pengantarnya menyoroti peningkatan kerawanan peredaran narkoba di kalangan pelajar dan generasi muda di wilayah Yogyakarta. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna mengevaluasi rencana aksi serta merumuskan langkah taktis dalam membentengi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika yang terus berkembang.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY mengupas tuntas tingkat kerawanan penyalahgunaan serta pentingnya membangun ketahanan masyarakat secara kolektif. Masyarakat didorong untuk lebih waspada terhadap berbagai modus operandi baru serta varian jenis narkotika modern yang kerap menyasar kelompok rentan di tengah lingkungan sosial.

Dinamika ancaman kejahatan narkotika di era modern turut dibedah oleh narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) DIY. Pemaparan difokuskan pada pergeseran paradigma dari zat fisik ke medium digital, identifikasi red flags penyalahgunaan ruang siber, hingga akselerasi ancaman baru berupa manipulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) dan konten sintetis dalam sindikat peredaran gelap.

Melalui keikutsertaan dalam rapat kerja Tim Terpadu P4GN ini, Kanwil Ditjenpas DIY siap mengintegrasikan hasil evaluasi dan rekomendasi lintas sektoral tersebut ke dalam sistem pengamanan dan pembinaan di UPT pemasyarakatan. Penguatan kolaborasi, peningkatan literasi digital, serta kewaspadaan tinggi terhadap modus operadian baru diyakini mampu menjadi perisai efektif dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba.

KANWIL DITJENPAS DIY RAIH CAPAIAN 85,71 PERSEN DALAM PERCEPATAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus memperkuat tata kelola administrasi dan akuntabilitas keuangan secara optimal. Komitmen tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan jajaran instansi dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengarahan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Ditjenpas DIY, Senin (09/11).

Rapat strategis ini diselenggarakan sebagai langkah persiapan menghadapi kegiatan konsinyasi dan rekonsiliasi nasional bersama Tim BPK RI yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 19 November 2026 di Jakarta. Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menetapkan target nasional penyelesaian tindak lanjut temuan BPK berada pada kisaran 93 hingga 95 persen, dengan mekanisme pemantauan berbasis Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang dikelola secara terpusat oleh Itjen Kemenimipas.

Berdasarkan data rekapitulasi capaian pemasyarakatan secara nasional, Kanwil Ditjenpas DIY meraih peringkat ketiga nasional dengan tingkat penyelesaian 85,71% dalam rekapitulasi capaian pemasyarakatan. Dari tujuh rekomendasi senilai Rp0,00, empat di Lapas Yogyakarta telah tuntas 100%, dua dalam verifikasi (Bapas Yogyakarta dan Rupbasan Wates), serta satu di tingkat Kanwil mendekati tahap akhir.

Menindaklanjuti hal ini, Kanwil Ditjenpas DIY menunjuk narahubung guna mempercepat koordinasi dengan Inspektorat Wilayah II, menginstruksikan seluruh satker melengkapi data dukung valid dalam seminggu, dan menyusun narasi kendala teknis. Langkah proaktif ini dilakukan agar seluruh rekomendasi tuntas sebelum konsinyasi bersama BPK RI, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.



TELADANI PAHLAWAN, KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT PEMBANGUNAN SDM







YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di lingkungan kantor wilayah pada Selasa (10/11). Kegiatan khidmat ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural serta pegawai, dengan Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Momentum nasional tersebut dimanfaatkan untuk mengenang jasa para pendahulu sekaligus meneguhkan kembali komitmen aparatur dalam mengisi kemerdekaan melalui pengabdian nyata.

Pelaksanaan upacara diwarnai dengan pembacaan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia oleh inspektur upacara di hadapan seluruh peserta. Dalam amanat tersebut, ditekankan bahwa nilai-nilai kepahlawanan masa kini tidak hanya berhenti pada kenangan masa lalu, melainkan harus dihidupkan melalui kerja sungguh-sungguh dan pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran para pejabat dan pegawai dalam barisan upacara mencerminkan kesiapan jajaran pemasyarakatan dalam meneruskan estafet perjuangan bangsa di era modern.

Sebagai penutup, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan publik yang berintegritas tinggi. Semangat Hari Pahlawan 2026 diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan humanis. Dengan langkah yang selaras bersama seluruh elemen bangsa, pemasyarakatan di Yogyakarta optimis dapat terus berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI SOSIALISASI TRANS SIBERPAS, PERKUAT PENGAWASAN DAN DETEKSIDINI BERBASIS DIGITAL

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti sosialisasi Trans Siberpas (Pengawasan Berbasis Digital melalui Patroli Siber Pas) secara daring melalui Zoom, Selasa (10/11). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY.





Trans Siberpas merupakan program yang diinisiasi oleh Kepala Subdirektorat Intelijen Pemasyarakatan, Heri Kusrita, sebagai upaya memperkuat deteksi dini, mengidentifikasi potensi ancaman, serta mendukung pengambilan keputusan melalui pemantauan pemberitaan dari berbagai media daring.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tata cara mengakses dan masuk ke laman Trans Siberpas, termasuk prosedur perubahan username dan password bagi operator. Melalui aplikasi ini, Kantor Wilayah dapat memantau pemberitaan positif maupun negatif terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah masing-masing, sekaligus mengetahui jumlah pemberitaan yang terpantau.

Selain itu, disampaikan rencana pembentukan grup Telegram untuk setiap wilayah guna mempermudah koordinasi dan komunikasi. Kanwil juga diharapkan dapat menindaklanjuti pemberitaan negatif dengan meneruskan informasi tersebut kepada UPT terkait agar dapat segera dilakukan langkah penanganan.

Sebagai tindak lanjut, buku panduan penggunaan Trans Siberpas akan dikirimkan sebagai pedoman bagi operator. Masing-masing Kantor Wilayah juga diminta untuk menunjuk dan mengirimkan operator yang bertanggung jawab mengelola aplikasi tersebut.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Ditjenpas DIY diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam memantau dinamika pemberitaan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan.



KANWIL DITJENPAS DIY HIMPUN DATA ANALISIS KEBIJAKAN DI LAPAS WONOSARI DAN LPP YOGYAKARTA

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Tim Analis Kebijakan melaksanakan kegiatan pengumpulan data analisis kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wonosari dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Yogyakarta, Selasa (10/11).

Kegiatan ini melibatkan Tim Analis Kebijakan Kanwil Ditjenpas DIY serta pegawai Lapas Wonosari dan LPP Yogyakarta sebagai responden yang mewakili masing-masing seksi di satuan kerja. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dan diskusi dua arah untuk menggali berbagai permasalahan serta kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.

Dalam diskusi di Lapas Kelas IIB Wonosari, sejumlah isu yang mengemuka meliputi transparansi rotasi jabatan, kekurangan tenaga administrasi, penyesuaian tunjangan kinerja Komandan Jaga, serta ketidaksinkronan jam kerja antara UPT dan unit di atasnya yang berpotensi menimbulkan tambahan jam kerja.

Selain itu, terdapat sejumlah usulan kajian dan standardisasi kebijakan, di antaranya penyusunan petunjuk pelaksanaan kunjungan keluarga warga binaan yang berlaku secara seragam di wilayah DIY, penyederhanaan proses penerbitan SK Asimilasi, serta kajian mengenai batas pengusulan hak warga binaan dan regulasi pidana khusus.

Sementara itu, di LPP Yogyakarta, pembahasan berfokus pada usulan penerapan lima hari kerja yang telah diajukan sebanyak tiga kali. Usulan tersebut mempertimbangkan minimnya aktivitas pada hari keenam, efisiensi perjalanan pegawai, serta upaya mencegah kelelahan kerja atau burnout. Sebagian besar pegawai LPP Yogyakarta diketahui melakukan perjalanan dari luar wilayah untuk bekerja.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berupaya memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi dan kebutuhan masing-masing UPT sebagai bahan penyusunan analisis serta rekomendasi kebijakan. Hasil pengumpulan data diharapkan dapat mendorong penguatan kelembagaan, efektivitas pelaksanaan tugas, pemerataan beban kerja, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

KANWIL DITJENPAS DIY GELAR UJIAN DINAS DAN UPKP 2026, DORONG PENGEMBANGAN KARIER DAN PROFESIONALITAS PEGAWAI

SLEMAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2026 bagi pegawai di lingkungan Kanwil Ditjenpas DIY, Selasa (10/11). Kegiatan berlangsung di Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan karier pegawai sekaligus meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan kualitas sumber daya manusia Pemasyarakatan.





Sebanyak 136 pegawai mengikuti ujian tersebut, yang terdiri atas 99 peserta dari DIY, 35 peserta dari Jawa Tengah, dan 2 peserta dari Jawa Timur. Pelaksanaan ujian menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT) BKN guna mendukung proses pengukuran kompetensi yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, Kristiana Hambawani. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menyampaikan bahwa Ujian Dinas dan UPKP merupakan salah satu bentuk dukungan organisasi terhadap peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai.

Menurutnya, setiap pegawai perlu terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri agar mampu memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Kristiana Hambawani, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, menegaskan bahwa pengembangan SDM Pemasyarakatan harus dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi tersebut juga wajib diimbangi dengan profesionalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab kerja.

Melalui penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2026, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari komitmen mewujudkan organisasi Pemasyarakatan yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

GERAKAN NASIONAL AKSI SOSIAL PEMASYARAKATAN MELALUI KLIEN BAPAS PEDULI 2026

BANTUL – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus mengoptimalkan proses pembinaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan. Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, meninjau langsung kegiatan kerja bakti pembersihan fasilitas umum yang diikuti oleh para Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari di Griya Abhipraya Pandawa pada Rabu (11/11).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Aksi Sosial Pemasyarakatan melalui program Klien Bapas Peduli 2026. Peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan proses pembinaan luar lembaga berjalan dengan optimal serta memberikan dorongan moral secara langsung kepada para klien pemasyarakatan yang terlibat.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Ali Syeh Banna menegaskan bahwa pelibatan aktif klien pemasyarakatan dalam kegiatan sosial merupakan sarana nyata untuk membangun kembali kepercayaan diri dan rasa kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Langkah ini menjadi wujud konkret keberhasilan program pembinaan luar lembaga yang dijalankan oleh Bapas Kelas II Wonosari.

Aksi sosial ini menyasar kebersihan sarana serta fasilitas umum di lingkungan sekitar Griya Abhipraya





Pandawa. Kegiatan tersebut diikuti oleh klien pemasyarakatan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul sebagai bagian dari kontribusi positif mereka kepada masyarakat selama menjalani masa pembimbingan.

Melalui momentum Gerakan Nasional Aksi Sosial Pemasyarakatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pembinaan. Upaya pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi klien pemasyarakatan diharapkan terus tercipta secara berkelanjutan demi terwujudnya tujuan Pemasyarakatan yang berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

BAKTI UNTUK NEGERI, KLIEN BAPAS WONOSARI SALURKAN BANTUAN UNTUK FASILITAS UMUM DI PARANGTRITIS

BANTUL - Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mengajak Klien dalam aksi sosial penyaluran bantuan sosial untuk Fasilitas Umum di sekitar Parangtritis, Rabu (11/11).



Kegiatan ini merupakan wujud nyata proses reintegrasi sosial para klien pemasyarakatan, untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Melalui aksi sosial, diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan sosial untuk sesama.

Aksi sosial ini diwujudkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa alat kebersihan yang diserahkan untuk Masjid Baitul Amin, Mancingan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Bapas Wonosari, Andigaf Riana Mutiah bersama Kepala Kanwil Ditjenpas DIY Mugammad Ali Syeh Banna.

Kabapas Wonsari menyampaikan bahwa bantuan sosial ini merupakan wujud kepedulian jajaran Pemasyarakatan beserta para Klien Pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini diharapkan kepedulian dan jiwa sosial para klien dapat terbentuk dan siap untuk kembali ke masyarakat.

"Pada hari ini kami melaksanakan berbagai kegiatan di wilayah Parangtritis, ini untuk memupuk jiwa sosial untamanya para klien agar lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Jadi ini merupakan salah satu proses reintegrasi sosial," tutur Kabapas Wonosari yang sering disapa Ana.

Mewakili pemerintah kapanewon kretek, Parjono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian dari jajaran Pemasyarakatan. Menurutnya dalam rangka menjaga aset berupa wisata pantai parangtritia ini dibutuhkan peran semua lini.

Selain kegiatan penyerahan bantuan sosial, para klien juga melaksanakan aksi bersih-bersih fasilitas umum. Tak hanya itu, para klien juga mengikuti pelatihan pijat energi yang diberikan langsung oleh Kakanwil Ditjenpas DIY.

KAKANWIL DITJENPAS DIY BERIKAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN MELALUI TERAPI ENERGI SEHAT LAHIR BATIN BAGI KLIEN BAPAS WONOSARI



BANTUL – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan bagi Klien Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan kemandirian bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang diselenggarakan di UPK Joglo Parangtritis Bantul, Rabu (11/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY Muhammad Ali Syeh Banna, Kepala Bapas Kelas II Wonosari Andi Gafriana Mutiah, perwakilan Kapanewon Kretek, dukuh, jagabaya, serta Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.

Dalam sambutannya, Kepala Bapas Kelas II Wonosari, Andi Gafriana Mutiah, mengajak para klien untuk memanfaatkan kesempatan pembinaan sebagai langkah memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Ia berharap para peserta dapat mengembangkan potensi serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan penguatan mental dan spiritual kepada para Klien Pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya keyakinan, kemauan, serta tindakan nyata dalam menjalani proses perubahan diri.

Dalam kesempatan tersebut, Ali juga mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan. Melalui nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, para klien diajak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat keimanan, serta menjadikan pengalaman hidup sebagai pembelajaran untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Melalui pelatihan tersebut, peserta diperkenalkan pada teknik terapi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran tubuh, membantu mengurangi rasa pegal dan lelah, serta memberikan efek relaksasi.



Melalui kegiatan pijat energi sehat, Kanwil Ditjenpas DIY terus berkomitmen menghadirkan pembimbingan yang menyentuh aspek keterampilan, mental, dan spiritual. Harapannya, bekal yang diperoleh dapat menjadi motivasi bagi Klien Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas diri, mengembangkan kemandirian, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih produktif dan bermanfaat di tengah masyarakat.

KANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT DETEKSI DINI DAN PENGAMANAN LAPAS SLEMAN



SLEMAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus mendorong penguatan sistem pengamanan melalui optimalisasi deteksi dini dan pendekatan humanis di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi deteksi dini dan pendekatan humanis. Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran Kabid Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Dr. Ina Purnaningati Saputro, A.Md.IP., S.H., M.H., sebagai narasumber dalam Sosialisasi Teknis Pengamanan di Lapas Kelas IIB Sleman pada Rabu (11/11), yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan petugas dan menciptakan lingkungan pembinaan yang aman serta kondusif.

Ina menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menuju langkah preventif yang mengutamakan pengamatan, komunikasi, dan pemahaman perilaku warga binaan. Selain itu, ia menguraikan tujuh tahapan dalam siklus deteksi dini, yang meliputi pengamatan, identifikasi, analisis, penilaian risiko, pelaporan, tindakan, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut berperan penting dalam membangun sistem pengamanan yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan agar petugas mampu memetakan kerawanan secara tepat.

"Pengamanan yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita menangani gangguan, tetapi bagaimana kita mampu mencegahnya sebelum terjadi. Deteksi dini harus dibangun melalui kepekaan petugas dalam melakukan pengamatan serta pendekatan yang humanis dan kekeluargaan kepada warga binaan. Ketika keamanan terjaga, proses pembinaan juga dapat berjalan secara optimal," ujar Ina.

Selain deteksi dini, Ina menggarisbawahi bahwa pengamanan dan pembinaan adalah dua fungsi yang saling berkaitan. Lingkungan yang aman menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Oleh karena itu, petugas perlu mengedepankan profesionalisme, integritas, serta keseimbangan antara ketegasan aturan dan penghormatan terhadap hak warga binaan.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Ditjenpas DIY mendorong jajaran Lapas Sleman untuk meningkatkan kemampuan identifikasi potensi kerawanan, memperkuat koordinasi antarfungsi, dan membangun budaya kerja berorientasi pencegahan guna meminimalkan risiko gangguan keamanan serta ketertiban.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas DIY dalam mendorong transformasi sistem pengamanan yang preventif, humanis, dan berintegritas. Melalui penguatan deteksi dini dan profesionalisme petugas, keamanan Lapas dipastikan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga fondasi utama bagi keberhasilan pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.

KANWIL DITJENPAS DIY GELAR MONEV DI LAPAS SLEMAN, PERKUAT DETEKSI DINI BERBASIS PERSUASIF DAN LAYANAN KESEHATAN

SLEMAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus mengintensifkan pengawasan guna menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban (kamtib) serta mutu layanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Tim Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman, Rabu (11/11).





Agenda monev kali ini difokuskan pada penguatan deteksi dini gangguan kamtib berbasis pendekatan persuasif, penerapan manajemen risiko, serta pemetaan titik-titik kerawanan. Tim meninjau langsung efektivitas komunikasi humanis antara petugas dan warga binaan dalam menggali informasi potensi gangguan, sekaligus memastikan analisis tingkat risiko dan kontrol keliling pada area krusial seperti blok hunian, area kunjungan, hingga tembok keliling berjalan terukur.

Melalui pendekatan tersebut, jajaran Lapas Kelas IIB Sleman diharapkan memiliki peta kerawanan yang akurat sebagai landasan kebijakan pengamanan yang berkelanjutan. Peningkatan kemampuan petugas dalam memitigasi risiko sejak dini dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah peredaran barang terlarang maupun potensi gangguan ketertiban lainnya di dalam lingkungan lapas.

Selain aspek pengamanan, Tim Monev Kanwil Ditjenpas DIY turut melakukan peninjauan menyeluruh ke area Klinik Pratama dan fasilitas penunjang perawatan warga binaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan standar prosedur pelayanan medis terpenuhi dengan baik, sekaligus memberikan catatan perbaikan konstruktif terkait optimalisasi keselamatan kerja di area dapur, penerbitan SK Kader Jiwa, serta penetapan jadwal layanan konseling resmi.

Seluruh rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berlangsung dengan tertib, lancar, serta dalam situasi yang aman dan terkendali. Melalui pengawasan berkala yang komprehensif ini, Kanwil Ditjenpas DIY optimis penyelenggaraan tugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman akan semakin profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan prima.

ASISTEN DEPUTI KEMEN PPPA APRESIASI GRIYA ABHIPRAYA PURBONEGORO BAPAS YOGYAKARTA

YOGYAKARTA – Griya Abhipraya Purbonegoro yang dikelola Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta mendapat apresiasi dari Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat melakukan kunjungan kerja bersama Tim Auditor, Rabu (11/11).





Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka peninjauan dan evaluasi pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) Tahun 2026, sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan bagi anak telah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi bersama Tim Auditor Kemen PPPA memberikan apresiasi kepada jajaran Bapas Yogyakarta atas keberhasilannya mengelola Griya Abhipraya Purbonegoro sebagai wadah pembimbingan, pembinaan, dan pemberdayaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Apresiasi tersebut diberikan setelah Griya Abhipraya Purbonegoro dinilai telah memenuhi standar LPKRA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi acuan nasional bagi lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), dengan menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan yang aman, berkualitas, inklusif, serta menjamin penghormatan terhadap hak dan martabat anak.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, yang turut mendampingi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi bagi jajaran Pemasyarakatan DIY untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
berintegritas, dan bermartabat.

Melalui hasil peninjauan tersebut, Griya Abhipraya Purbonegoro diharapkan dapat terus mengembangkan kualitas layanan dan menjadi salah satu contoh praktik baik penyelenggaraan pembimbingan dan perlindungan anak di lingkungan Pemasyarakatan.

CEGAH RESIDIVISME, BAPAS YOGYAKARTA BANGUN DESA REINTEGRASI SOSIAL HINGGA TINGKAT KALURAHAN



KULONPROGO – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) Desa Reintegrasi Sosial, yang digelar di Hotel Morazen Yogyakarta, Kamis (12/11).

Kegiatan yang melibatkan aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, hingga perwakilan kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna.

Dalam sambutannya, Ali menegaskan bahwa keberhasilan pembimbingan Klien Pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada perubahan perilaku individu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembentukan Kelayan Binter di tingkat kalurahan menjadi langkah strategis Bapas Yogyakarta dalam membangun sistem pembimbingan berbasis kolaborasi masyarakat. Wadah ini menyatukan peran pemda, pemerintah kalurahan, APH, TNI-Polri, tokoh masyarakat dan agama, dunia usaha, Pokmas Lipas, hingga Griya Abhipraya untuk memperkuat pengawasan, pendampingan, serta pencegahan residivisme secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, Klien Pemasyarakatan diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, penguatan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, forum tersebut juga menjadi momentum pengiapan implementasi KUHP Nasional terkait pidana kerja sosial yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah lokasi pelaksanaan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup klien, Bapas Yogyakarta turut menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Manut Wargo Kulon Progo guna menyediakan layanan pendidikan berkelanjutan. Melalui rangkaian sinergi lintas sektor ini, Bapas Yogyakarta berkomitmen menghadirkan pembimbingan yang humanis, kolaboratif, serta mendorong kemandirian dan perubahan perilaku nyata bagi Klien Pemasyarakatan.



LPKA YOGYAKARTA JALANI AUDIT STANDAR LPKRA DARI KEMEN PPPA



WONOSARI – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta menjalani Audit Kedua Pengukuran Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) Usulan Kementerian/Lembaga Tahun 2026, Kamis (12/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan di LPKA berjalan sesuai standar perlindungan khusus ramah anak.

Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 08.30 WIB yang dihadiri Tim Auditor, jajaran LPKA, DP3AP2 DIY, dan Kemen PPPA diawali penyambutan hangat melalui pertunjukan Cucuk Lampah, Karawitan, dan Tari Jaranan oleh Anak Binaan sebagai bukti keberhasilan pembinaan seni budaya.

Setelah sambutan pembukaan di aula, Tim Auditor melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, verifikasi indikator standar LPKRA, serta meninjau langsung sarana prasarana untuk memastikan lingkungan pembinaan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi konfirmasi hasil sementara, klarifikasi, dan tanggapan sebagai bahan tindak lanjut.

penyempurnaan dokumen, fasilitas, dan layanan. Pelaksanaan audit kedua ini menjadi momentum penting bagi LPKA Kelas II Yogyakarta untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah terpenuhi sekaligus aspek yang masih perlu disempurnakan. Berbagai catatan dan rekomendasi Tim Auditor akan menjadi bahan tindak lanjut, baik dalam penyempurnaan dokumen dan bukti dukung, peningkatan kualitas sarana prasarana, maupun penguatan pelayanan dan perlindungan Anak Binaan.

Melalui proses evaluasi yang berkelanjutan serta sinergi dengan DP3AP2 DIY, Kemen PPPA, dan instansi terkait, LPKA Kelas II Yogyakarta diharapkan semakin optimal dalam menghadirkan lingkungan pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Komitmen mewujudkan LPKA yang ramah anak bukan hanya tentang pemenuhan indikator dan standar administratif, melainkan juga memastikan setiap Anak Binaan memperoleh hak, perlindungan, kesempatan berkembang, serta pelayanan yang layak selama menjalani masa pembinaan.



KANWIL DITJENPAS DIY GELAR PENYULUHAN HUKUM DI RUTAN BANTUL, SOSIALISASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN

BANTUL – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus berkomitmen meningkatkan literasi serta kesadaran hukum bagi warga binaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Tim Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum Kanwil Ditjenpas DIY di Aula Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul, Kamis (12/11).

Kegiatan edukatif yang diikuti oleh para tahanan dan narapidana ini dibuka secara khidmat dengan doa bersama serta sesi perkenalan dari tim penyuluh hukum. Suasana akrab dan terbuka langsung terbangun sejak awal acara guna memastikan para peserta dapat menyerap seluruh materi hukum dengan nyaman dan tanpa rasa canggung. Dalam sesi utama, tim JF Penyuluh Hukum memaparkan secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban tahanan serta narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan mencakup berbagai hak dasar yang dijamin oleh negara—seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan—serta kewajiban warga binaan untuk mematuhi tata tertib selama menjalani masa penahanan maupun pembinaan.

Antusiasme peserta terlihat tinggi saat kegiatan berlanjut ke sesi sharing dan tanya jawab interaktif. Para tahanan dan narapidana memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi serta menggali kejelasan mengenai berbagai prosedur layanan pemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan proses hukum yang tengah mereka jalani.

Melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum yang berkelanjutan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap seluruh warga binaan di Rutan Kelas IIB Bantul dapat memahami secara utuh hak serta kewajibannya. Pemahaman regulasi yang baik ini diharapkan mampu mendorong terciptanya suasana pembinaan yang kondusif, tertib, serta mendukung kesiapan warga binaan untuk kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.







RANGKUMAN KEGIATAN SIDANG TPP MINGGU INI PADA KANWIL DITJENPAS DIY

15 WBP RUTAN BANTUL DISETUJUI TERIMA HAK INTEGRASI DAN REMISI SUSULAN





Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus mengoptimalkan pemenuhan hak bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta menekan angka overkapasitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang digelar di Rutan Kelas IIB Bantul pada Kamis, 12 November 2026.

Penyelenggaraan sidang TPP pekan ini melibatkan koordinasi lintas sektoral yang komprehensif. Agenda tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota TPP Rutan Bantul, Wali Pemasyarakatan, 2 orang perwakilan dari Kanwil Ditjenpas DIY, 2 petugas dari Bapas Kelas II Wonosari, serta para warga binaan yang diusulkan bersama keluarga selaku penjamin.

Fokus utama pembahasan dalam sidang TPP ini meliputi evaluasi mendalam terhadap pengusulan program integrasi yakni Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) serta pengajuan remisi susulan. Berdasarkan hasil pembahasan menyeluruh, sidang menyetujui total 13 warga binaan untuk diusulkan program integrasi (1 PB dan 12 CB) serta 2 warga binaan untuk remisi susulan.

Seluruh proses verifikasi dan validasi usulan dilaksanakan secara cermat dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim TPP melakukan penelaahan detail terhadap kelengkapan persyaratan administratif maupun substantif, rekam jejak pembinaan, serta mempertimbangkan secara ketat aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan.

Melalui penyelenggaraan sidang TPP sepanjang pekan ini, Kanwil Ditjenpas DIY memproyeksikan pengusulan integrasi dan remisi sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta mengurai tingkat hunian berlebih. Pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut secara resmi dilaporkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan (Ina Purnaningati Saputro) kepada Kepala Kanwil Ditjenpas DIY sebagai landasan evaluasi berkala dan perumusan kebijakan teknis pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta.



PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 13 November 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY